

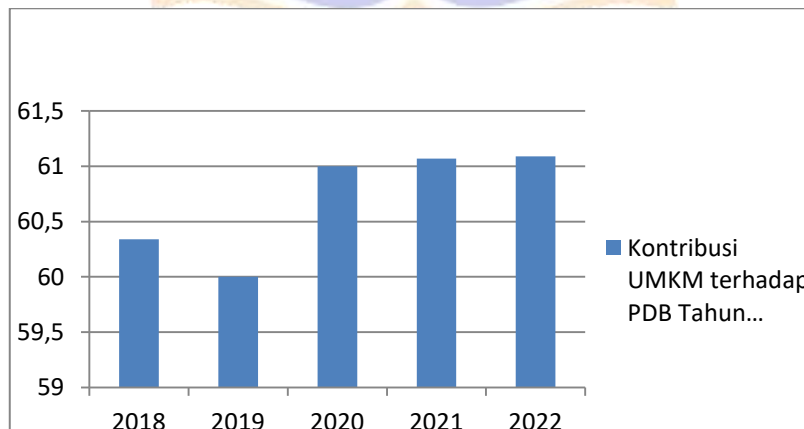
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dewasa ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Seperti diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Adanya kontribusi UMKM di Indonesia ini mampu menghadapi krisis ekonomi dan mampu menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat perkembangan perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1
Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2018-2022



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2023

Berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34%, kemudian mengalami penurunan sebesar 0,34% pada tahun 2019 sehingga kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 60,00%. Selanjutnya pada tahun 2020 kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,00% sehingga mengalami peningkatan sebesar 1,00%. Kemudian untuk tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit terhadap UMKM berkontribusi terhadap PDB sejumlah 61,07% dan 61,09%.

Pada tahun 2023, pemerintah di Indonesia terus mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memasuki era ekosistem digital. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023) jumlah UMKM yang telah memasuki ekosistem digital mencapai 20,76 juta unit. Jumlah ini sudah meningkat 26,6% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 16,4 juta UMKM di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa sudah ada 32,44% dari 64 juta unit UMKM yang telah memasuki ekosistem digital. Dengan besarnya potensi yang dimiliki UMKM terhadap perekonomian negara dan adanya peningkatan jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital ini tidak dipungkiri bahwa seiring perkembangannya masih terdapat banyak permasalahan. Salah satunya, yaitu kinerja usaha, dimana kinerja usaha merupakan penentuan melalui ukuran tertentu yang mana dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan (Kusumadewi, 2017). Oleh karena itu, diperlukannya upaya esensial terkait peningkatan kinerja UMKM.

Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki peningkatann UMKM yang cukup dratis, khususnya di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut terlihat dari

adanya perkembangan jumlah pelaku UMKM. Berikut merupakan data perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng dari tahun 2018-2022 pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah UMKM
Di Kabupaten Buleleng

No	Klasifikasi Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Usaha Mikro	25.202	26.048	44.670	47.311	55.173
2	Usaha Kecil	9.140	9.294	9.576	9.654	10.827
3	Usaha Menengah	193	196	226	234	351
4	Usaha besar	17	17	17	17	17
	Total	34.552	35.555	54.489	57.216	66.368

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng, 2023

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, perkembangan jumlah UMKM dari tahun 2018-2021 selalu mengalami kenaikan yang cukup drastis. Dimana pada tahun 2018 jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 34.552 UMKM, kemudian tahun 2019 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.003 menjadi 35.555 UMKM, selanjutnya untuk tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat drastis, dikarenakan pada tahun 2020 tersebut banyak masyarakat di PHK atau di berhentikan dari tempat kerjanya dikarenakan virus Covid-19 menyerang negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian banyak masyarakat mulai beralih dengan membuka usaha baru, hal tersebut yang menyebabkan pada tahun 2020 jumlah UMKM di kabupaten Buleleng mengalami peningkatan secara dratis yaitu sebanyak 18.934 menjadi 54.489 UMKM. Pada tahun 2021 juga mengalami

peningkatan pada tahun sebelumnya sebanyak 2.727 dan di tahun 2022 mengalami peningkatan sejumlah 9.152 UMKM. Berikut data mengenai jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng per masing-masing kecamatan dari tahun 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah UMKM Per kecamatan
Di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Gerokgak	4.619	4.710	4.994	5.286	5.466
2	Seririt	4.190	4.461	4.502	4.502	4.578
3	BusungBiu	3.687	3.755	3.810	3.853	3.938
4	Banjar	3.490	3.578	3.612	3.649	3.739
5	Sukasada	2.941	3.014	3.073	3.110	3.210
6	Buleleng	6.600	6.836	6.951	7.020	7.397
7	Sawan	3.128	3.158	3.241	3.268	3.378
8	Kubutambahan	2.765	2.823	2.847	2.866	2.991
9	Tejakula	3.132	3.220	3.320	3.420	3.550

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng, 2023

Di balik peningkatan jumlah UMKM di per kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, namun kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan kinerja UMKM, khususnya di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan hasil observasi awal menemukan fakta bahwa kinerja yang dimiliki UMKM di Kecamatan Buleleng tidak cukup baik. Hal ini dilihat melalui tidak adanya peningkatan yang dialami UMKM selama mengembangkan usahanya. Dimana kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan berupa penurunan penjualan, laba, modal, dan kemampuan membayar kredit sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Kinerja UMKM Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No.	Aspek	Rata-rata Persentase
1	Penurunan penjualan	61%
2	Penurunan laba usaha	61%
3	Permasalahan modal	Dialami oleh 71,4% UMKM
4	Penurunan kemampuan pembayaran angsuran bank	Dirasakan hampir 100% UMKM

Sumber: Balitbang Kab. Buleleng & LP2M Undiksha (2020)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan kinerja yang signifikan berupa penurunan penjualan rata-rata 62%, penurunan laba usaha rata-rata 61%, permasalahan modal yang dialami oleh 71,4% UMKM dan bahkan hampir seluruh UMKM mengalami kesulitan dalam membayar angsuran bank. Permasalahan kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng ini masih tetap bertahan hingga Tahun 2023 sebagaimana data yang tersaji dalam Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Performa Kinerja UMKM di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Performa Kinerja Lebih Buruk	Persentase Performa Usaha
1	Buleleng	5.231	20,79%
2	Denpasar	4.308	17,12%
3	Gianyar	4.249	16,88%
4	Badung	3.594	14,28%
5	Tabanan	2.511	9,98%
6	Jembrana	2.370	9,42%
7	Bangli	1.222	4,86%
8	Karangasem	1.067	4,24%
9	Klungkung	614	2,44%
Total		25.166	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki tingkat kinerja performa yang buruk yaitu 5.231 atau 20,79%, dimana usaha cenderung stuck dan hanya berdiam di tempat selama pelaksanaan

usahanya di bandingkan di Kabupaten lain. Performa usaha merupakan segala hal terkait peningkatan, penurunan, maupun konstan yang berhubungan dengan perkembangan usaha dari pelaku UMKM. Tingkat performa usaha diukur berdasarkan jumlah aset maupun laba usaha yang diperoleh UMKM dalam satu periode.

Kinerja UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu teori yang menjelaskan faktor-faktor berpengaruh terhadap kinerja adalah *Resource Based View Theory* (RBV) pertama kali dicetuskan oleh Wernerfelt pada tahun 1984 (Tan et al., 2015). *Resources Based View Theory* menjelaskan sumber daya yang dimiliki perusahaan baik itu sumber daya tidak berwujud dan sumber daya berwujud dapat mendorong perusahaan untuk menyusun strategi dalam rangka mewujudkan keunggulan bersaing dan meningkatkan kinerja (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021). Sumber daya yang dimiliki oleh UMKM terdiri dari berbagai jenis, beberapa diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya modal, maupun sumber daya teknologi. Sehingga berdasarkan *Resources Based View Theory*, kinerja UMKM dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, sumber daya modal, maupun sumber daya teknologi. UMKM di Kecamatan Buleleng memiliki permasalahan terkait sumber daya seperti modal yang kurang memadai serta penggunaan *e-payment* dan media *e-commerce* yang kurang baik, sehingga penelitian ini berfokus pada akses permodalan, *e-payment* dan *e-commerce*.

Akses permodalan adalah permasalahan yang sering dihadapi pelaku UMKM. Dimana modal merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Dengan modal yang

tidak memadai atau kurang mencukupi dari operasional yang dijalankan, maka akan mengakibatkan menjadi salah satu menghambat perkembangan UMKM di kecamatan Buleleng. Dengan permasalahan tersebut pelaku UMKM mengalami hambatan dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya bahkan terdapat beberapa pelaku UMKM harus mengalami gulung tikar karena permasalahan permodalan tersebut. Sebagian besar pelaku UMKM meminjamkan modalnya di lembaga keuangan, salah satunya bank. Di sisi lain proses untuk mendapatkan permodalan di lembaga keuangan tersebut masih terbilang sulit disebabkan karena beberapa kendala yang di hadapi oleh pelaku UMKM seperti kendala administrasi, tidak dapat memenuhi atau mengikuti persyaratan prosedur yang diminta oleh lembaga keuangan dan jaminan yang diinginkan oleh lembaga keuangan.

Semanjak virus Covid-19 yang melanda negara Indonesia ini, pemerintah Indonesia memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk pelaku khususnya usaha mikro yang berguna untuk menunjang operasional UMKM. Namun bantuan tersebut belum sepenuhnya didapat oleh pelaku UMKM. Dimana di Kabupaten Buleleng sendiri, khususnya kecamatan Buleleng banyak pelaku UMKM yang sudah mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT), namun masih saja pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Berdasarkan hasil observasi melalui beberapa pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Buleleng menyatakan bahwa pelaku tersebut belum mendapatkan bantuan BLT tersebut. Dimana baru tercatat sebanyak 4.278 usaha mikro yang menerima bantuan BLT tersebut, sedangkan jumlah UMKM di Kecamatan Buleleleng

sebanyak 7.397 (Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng, 2023).

Dimana menurut penelitian yang dilakukan oleh Wismajaya (2021) menyatakan bahwa akses permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2018) juga mengatakan hal yang sama bahwa akses permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kota Bandung. Namun pada penelitian Larasati (2018) mengungkapkan bahwa akses permodalan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Surabaya.

Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja yaitu *e-payment* atau pembayaran digital. Dimana di era sekarang ini pemerintah mengharuskan pelaku UMKM untuk menggunakan pembayaran yang bersifat digital. Dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hal tersebut dibuktikan semenjak Covid-19 ini melanda, banyak pelaku UMKM beralih menggunakan metode *e-payment* atau pembayaran digital tersebut untuk melakukan transaksi dengan konsumen. Dimana selama pandemi Covid-19 diketahui terjadi peningkatan transaksi elektronik yang meningkat tajam sebanyak 66%, sedangkan penggunaan sistem pembayaran digital meningkat 37,8% (Ulya, 2020). Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah mengakibatkan konsumen mencari cara untuk tetap memenuhi kebutuhannya, khususnya dalam hal berbelanja, sehingga sistem pembayaran digital dianggap mudah dan sesuai.

UMKM di Kecamatan Buleleng sudah banyak yang menggunakan pembayaran secara digital atau *e-payment*. Pembayaran digital ini pertama kali di

berlaku di kawasan kuliner Taman Kota Singaraja dengan 6.346 merchant telah tersebar di Kecamatan Buleleng (Sugiari, 2020). Namun pembayaran digital tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyak UMKM tidak menggunakan pembayaran digital dalam menjalankan usahanya. Kemudian terdapat beberapa pelaku UMKM yang sudah menerapkan pembayaran digital, namun terdapat barcode pembayaran yang rusak serta barcode di tempatkan tersembunyi sehingga tidak berjalan dengan efektif. Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al. (2022) menyatakan bahwa *e-payment* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kota Makasar, kemudian sejalan dengan penelitian yang sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Subekti & Pahlevi (2022) mengatakan bahwa *e-payment* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kota Bandung. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bastian (2020) mengatakan bahwa *e-payment* berpengaruh negatif terhadap kinerja UMKM.

Permasalahan terakhir terkait kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng, yaitu *e-commerce*. Dimana perlu di ketahui bahwa di zaman 4.0 ini teknologi merupakan suatu hal yang penting. Dimana teknologi memiliki peran dalam membantu mengembangkan suatu UMKM, seperti diketahui bahwa sekarang ini pelaku UMKM di haruskan untuk menggunakan teknologi untuk memasarkan, menjual ataupun mengembangkan usaha yang dijalankannya. Dimana menurut Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (2022) mencatat pengguna *e-commerce* sebagai media untuk menjual, memasarkan dan mengembangkan usahanya yaitu sebanyak 19,5 juta atau sebesar 30,4%. Hal

tersebut diartikan bahwa penggunaan *e-commerce* sudah banyak di gunakan oleh pelaku UMKM.

Semenjak pelaku usaha menggunakan menggunakan platform *e-commerce* sebagai media untuk memasarkan, menjual dan mengembangkan usahanya. Hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan penjualan usaha yang mereka jalankan. Khususnya UMKM di Kecamatan Buleleng sudah banyak yang menerapkan penggunaan *e-commerce* sebagai tempat untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi tidak dapat berjalan dengan efektif. Dimana terdapat beberapa pelaku UMKM yang masih kurang memahami menggunakan media *e-commerce* sebagai media untuk mengembangkan usahanya. Namun terdapat beberapa pelaku usaha sudah menggunakan platform *e-commerce* sebagai media untuk mengembangkan, memasarkan dan menjual produknya, tetapi belum secara optimal dalam menggunakan platform tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Tirtayanti (2022) menyatakan bahwa penggunaan *e-commerce* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Jembrana. Berikutnya sejalan dengan pernyataan tersebut, Haikhal (2022) menyatakan bahwa *e-commerce* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM (Studi Empiris Pada UMKM Kecamatan Bangkinang Kota). Namun berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh Banowaty (2021) menyatakan bahwa *e-commerce* berpengaruh negatif terhadap kinerja UMKM.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait kinerja UMKM, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada hasil penelitian sebelumnya masih terdapat inkosistensi pada variabel akses permodalan, *e-payment* dan *e-commerce* terhadap kinerja UMKM, hal tersebut melatarbelakangi penelitian ini untuk

menguji kembali pengaruh dari masing-masing variabel sebelumnya. Perbedaan selanjutnya terletak pada kebaruan variabel, yaitu variabel *e-payment*, dimana variabel tersebut masih jarang diteliti atau digunakan oleh peneliti dalam penelitian kinerja sebelumnya. Kemudian yang terakhir pada lokasi penelitian, dimana belum ada yang meneliti variabel *e-payment* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja UMKM dengan judul “**Pengaruh Akses Permodalan, *E-payment* dan *E-Commerce* Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng ini masih saja kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan dikarenakan terdapat beberapa persyaratan yang sulit dan tidak bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM sendiri.
2. Pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng belum semuanya menggunakan *e-payment* dalam menjalankan usahanya dan terdapat beberapa pelaku UMKM yang sudah menggunakan pembayaran digital, namun kurang berjalan efektif.
3. Pelaku UMKM kurang optimal dalam menggunakan *e-commerce* dalam menjalankan usahanya, sehingga kurang berjalan dengan efektif.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka peneliti membuat beberapa pembatasan masalah dalam penelitian, dimana penelitian ini hanya membahas terkait variabel akses permodalan, *e-payment* dan *e-commerce* terhadap kinerja UMKM. Kemudian penelitian ini juga dibatasi hanya pada UMKM yang berada di Kecamatan Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng?
2. Apakah *e-payment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapapun tujuan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akses permodalan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh *e-payment* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng.

3. Untuk mengetahui pengaruh *e-commerce* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui pengaruh akses permodalan, *e-payment*, dan *e-commerce* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kecamatan Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh akses permodalan, *e-payment*, dan *e-commerce* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja UMKM.

- b. Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi dalam meningkatkan kinerja usahanya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan sumber atau referensi mengenai akases permodalan, *e-payment* dan *e-commerce* bagi peneliti selanjutnya.

